

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah wilayah yang terdiri dari 17.504 pulau dengan negara penduduk terbanyak. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia. Hal ini tercermin dari kepadatan penduduk yang semakin meningkat di tahun 2020. Kepadatan penduduk Indonesia sebesar 141 orang per kilometer persegi menurut Hasil Sensus Penduduk (2020). Dari kenaikan jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya membuat sumber daya manusia (SDM) semakin bertambah.

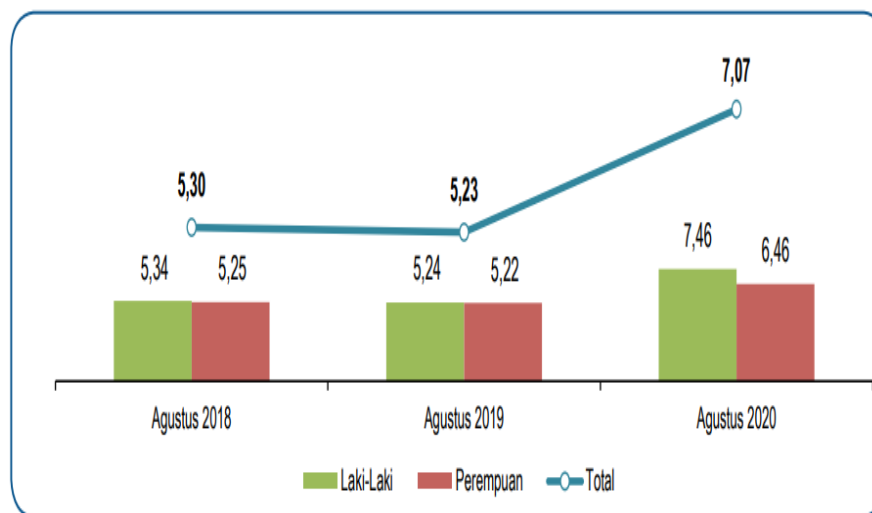
SDM menjadi salah satu kunci dalam pembangunan suatu negara. Kualitas dari SDM perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Menurut Alvianisari (2017) pengelolaan SDM merupakan keseluruhan pelaksanaan aktivitas maupun program yang bertujuan untuk pengembangan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Fungsi pada pengelolaan SDM harus dijalankan secara maksimal agar semua tujuan dari organisasi maupun individu dapat terpenuhi. Karena kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas pula dari produktivitas SDM yang dimiliki.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta. Hasil dari sensus penduduk tahun 2020 menyebutkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi millennial. Proporsi penduduk generasi Z sebanyak 27,94 persen penduduk dan generasi millennial sebanyak 25,87 persen dari total penduduk Indonesia. Kedua

generasi ini merupakan usia produktif yang diharapkan dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Ida (2004) bahwa kelompok umur penduduk 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk di usia 15-64 tahun dikategorikan sebagai kelompok umur produktif dan kelompok penduduk di umur 65 tahun keatas dianggap sebagai kelompok penduduk yang tidak lagi produktif. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1997-2000an. Generasi Z merupakan generasi mudah yang sudah mengenal banyak teknologi. Dalam hal ini tentunya kelas produktif usia generasi Z dan generasi millennial akan mempercepat Indonesia masuk dalam revolusi industri 4.0.

Persentase jumlah penduduk produktif terus meningkat sebesar 66,09 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,72 persen populasi penduduk di tahun 2020 (Administrator, 2021). Semakin banyak penduduk usia produktif maka akan semakin banyak tenaga kerja dan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang besar di suatu negara masih dianggap oleh sebagian ahli ekonomi sebagai penghambat pembangunan. Salah satunya pendapat dari Mulyadi dalam Azulaidin (2021) yang menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara yang sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan angkatan kerja semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Dalam pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan tidak sebanding dengan tingkat pengangguran yang ada menyebabkan semakin banyak orang yang menganggur termasuk penduduk produktif.

Pengangguran merupakan masalah terbesar yang dihadapi setiap negara, yang tidak lagi asing terdengar di setiap daerah, baik dalam tingkat pusat provinsi, maupun kabupaten/kota. Menurut data dari BPS Republik Indonesia, (2020) menyebutkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen meningkat 1,84 persen dari Agustus 2019. Per Agustus 2020 TPT pada laki-laki sebesar 7,46 persen dan TPT pada perempuan sebesar 6,46 persen, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh diagram di bawah ini:



Gambar 1. 1Tren Tingkat TPT Indonesia Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2018–Agustus 2020

Sumber: BPS Republik Indonesia (2020) dalam Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan suatu usaha, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena dianggap tidak mungkin untuk mendapatkannya, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja. Dari data BPS Republik Indonesia (2020), juga menyebutkan bahwa penduduk yang bekerja turun sebanyak 0,31 juta yaitu menjadi 128,45 juta orang dari Agustus 2019. Terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 yang terdiri dari beberapa kategori mulai dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta, Bukan Angkatan kerja sebanyak 0,76 orang, sementara yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang (Indonesia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang bersedia melakukan pekerjaan, baik mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang sedang bersekolah. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang memasuki usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun (Disnaker, 2019). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun sampai 65 tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data BPS Republik Indonesia tahun 2021 memaparkan data terkait jumlah penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja khususnya di Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan dua wilayah khusus yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. 1 Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Provinsi Tahun 2021 di Pulau Jawa

Provinsi	2021 Februari							
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK
DKI Jakarta	4.909.174	456.600	5.365.774	91,49	732.471	1.723.507	418.074	2.874.052
Jawa Barat	22.311.685	2.185.465	24.497.150	91,08	2.838.508	8.301.487	2.147.189	13.287.184
Jawa Tengah	17.701.854	1.122.663	18.824.517	94,04	1.836.911	4.952.028	1.517.587	8.306.526
D I Y	2.201.508	98.399	2.299.907	95,72	273.238	456.968	128.539	858.745
Jawa Timur	21.030.711	1.147.061	22.177.772	94,83	2.079.158	6.009.817	1.528.726	9.617.701
Banten	5.686.915	563.402	6.250.317	90,99	721.683	2.072.640	679.188	3.473.511
Total	131.064.305	8.746.008	139.810.313	93,74	15.271.168	39.848.534	10.430.421	65.550.123

Sumber: BPS Republik Indonesia (2021) dalam *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Tahun 2021*

Dari tabel Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) BPS Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di pulau jawa yang memiliki angka pengangguran tertinggi yaitu 1.147.061 juta jiwa. Dalam angka Angkatan Kerja provinsi Jawa Timur juga merupakan Provinsi tertinggi dengan jumlah 22.177.772 juta jiwa setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penopang kekuatan ekonomi di Indonesia (Purwanto, 2020).

Secara Administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan kepadatan penduduk 121.028 ribu Jiwa/km². Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa timur pada 2020 mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020 Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur sebesar 31,66 juta orang, bertambah sekitar 241 ribu orang (0,77 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Menurut Data BPS Provinsi Jawa Timur diketahui jumlah

angkatan kerja pada february tahun 2021 menurun sebesar 343,98 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020. Dengan jumlah pengangguran sebesar 1.147.061 juta jiwa.

Tabel 1. 2 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Kabupaten/ Kota	Jenis Kegiatan			Total	TPT Total
	Bekerja	Pengangguran	BAK		
Pacitan	357 946	8 339	89 532	455 817	2,28
Ponorogo	490 912	22 869	204 653	718 434	4,45
Trenggalek	411 703	17 632	137 659	566 994	4,11
Tulungagung	578 760	27 951	222 520	829 231	4,61
Blitar	632 461	25 134	270 796	928 391	3,82
Kediri	832 550	46 061	364 972	1 243 583	5,24
Malang	1 402 920	81 532	588 352	2 072 804	5,49
Lumajang	539 007	18 747	275 736	833 490	3,36
Jember	1 249 204	67 448	618 517	1 935 169	5,12
Banyuwangi	873 521	49 252	362 429	1 285 202	5,34
Bondowoso	452 545	19 473	156 590	628 608	4,13
Situbondo	392 540	15 722	149 666	557 928	3,85
Probolinggo	640 983	32 750	250 597	924 330	4,86
Pasuruan	814 614	54 181	415 115	1 283 910	6,24
Sidoarjo	1 066 792	131 444	585 534	1 783 770	10,97
Mojokerto	584 689	35 701	268 580	888 970	5,75
Jombang	645 121	52 169	295 543	992 833	7,48
Nganjuk	525 488	26 523	287 560	839 571	4,80
Madiun	377 331	19 039	158 595	554 965	4,80
Magetan	367 480	14 283	139 565	521 328	3,74
Ngawi	468 624	26 936	186 197	681 757	5,44
Bojonegoro	715 089	37 012	256 127	1 008 228	4,92
Tuban	645 156	32 603	265 672	943 431	4,81
Lamongan	646 425	34 984	280 953	962 362	5,13
Gresik	628 952	56 261	344 773	1 029 986	8,21
Bangkalan	456 436	43 859	246 364	746 659	8,77
Sampang	496 528	17 230	220 889	734 647	3,35
Pamekasan	463 506	16 772	207 609	687 887	3,49
Sumenep	647 489	18 952	221 915	888 356	2,84
Kediri	142 804	9 461	78 429	230 694	6,21
Blitar	73 201	5 244	34 377	112 822	6,68
Malang	425 368	45 242	238 011	708 621	9,61
Probolinggo	119 345	8 572	57 288	185 205	6,70
Pasuruan	101 644	6 867	46 384	154 895	6,33
Mojokerto	65 208	4 712	32 583	102 503	6,74
Madiun	90 334	8 195	45 032	143 561	8,32
Surabaya	1 427 668	154 896	743 185	2 325 749	9,79
Batu	112 623	7 097	45 800	165 520	5,93
Jumlah	20 962 967	1 301 145	9 394 099	31 658 211	5,84

Sumber: BPS Republik Indonesia (2021) dalam *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*, Tahun 2021

Menurut tabel di atas, data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi dengan jumlah 131.444 ribu jiwa atau dalam persentase sebesar 10,97%. Nanga (2005) menjelaskan bahwa pengangguran merupakan Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*Labor Force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Bupati Sidoarjo yang mengatakan di dalam berita bahwa:

“Menurut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, beberapa waktu belakangan, ada penambahan sampai sekitar 135.000 pengangguran baru. Ada penambahan sekitar 135.000 pengangguran baru. Dari sebelumnya hanya di kisaran 4,72 persen sekarang naik menjadi 10,98 persen. Total sekarang ada sekitar 288.000 pengangguran,” kata Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor di sela acara pelatihan Barista di kantor Kecamatan Tarik, Kamis (27/5/2021).

(<https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/27/angkapengangguran-di-sidoarjo-tertinggi-di-jawa-timur-tembus-288000-orang>, diakses pada 10 November 2021)

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2020 sebanyak 1,78 juta orang, naik 30,02 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dari total penduduk usia kerja pada Agustus 2020 tersebut, 1,19 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 di Sidoarjo mengalami kenaikan 2,00 persen atau sekitar 23,50 ribu dibandingkan Agustus 2019. Secara detail seperti pada gambar berikut ini:

Status Keadaan Ketenagakerjaan (1)	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2019-Agustus 2020)	
	Ribu Orang	Ribu Orang	Ribu Orang	Ribu Orang	persen
Penduduk Usia Kerja	1 723,81	1 753,75	1 783,77	30,02	1,71
Angkatan Kerja	1 118,55	1 174,73	1 198,23	23,50	2,00
Bekerja	1 066,83	1 120,48	1 066,79	-53,69	-4,79
Pengangguran	51,72	54,25	131,44	77,19	142,29
Bukan Angkatan Kerja	605,26	579,02	585,53	6,51	1,12
	Persen	Persen	Persen	Persen point	
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,62	4,62	10,97	6,35	
Laki-laki			11,65		
Perempuan			9,91		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	54,89	66,98	67,17	0,19	
Laki-laki			81,55		
Perempuan			52,78		

Gambar 1. 2 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Sidoarjo

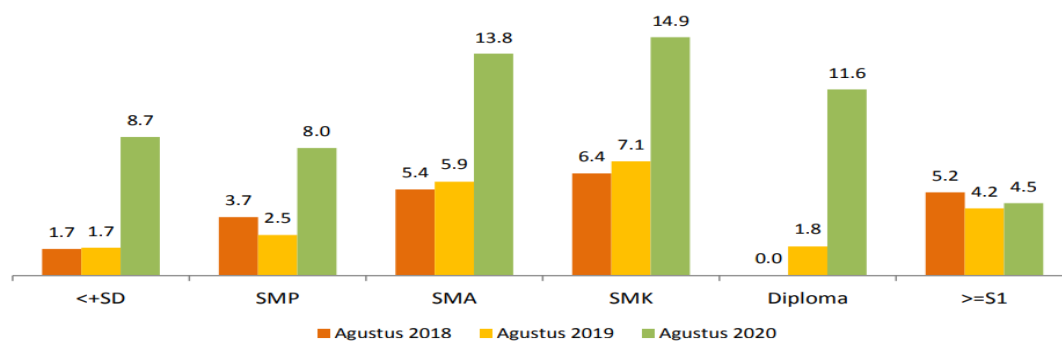
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2020) dalam Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021

Jumlah penduduk usia kerja pada Kabupaten Sidoarjo pada agustus 2020 sebanyak 1.783,77 juta jiwa meningkat sebesar 30.02 ribu dibandingkan Agustus 2019. Jumlah penduduk ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Pada Agustus 2020 sebanyak 1.198 juta orang angkatan bekerja dan ada peningkatan jumlah penduduk sekitar 23,50 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak menjadi sebuah masalah bila dalam daya dukung perekonomian yang efektif di suatu daerah cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk salah satunya dalam penyediaan kesempatan kerja.

Disisi lain, pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sidoarjo Agustus 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 67,17 persen meningkat 0,19 persen dari Agustus 2019. Kenaikan dari TPAK ini memberikan gambaran bahwa adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Kenaikan TPAK pastinya disebabkan oleh beberapa permasalahan

salah satunya kenaikan jumlah pengangguran (Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo Agustus 2020).

Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat (Jundi & Poerwono, 2014). Tingginya angka pengangguran merupakan bentuk kurang berhasilnya pembangunan suatu negara atau daerah, karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin naiknya pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskinan.



Gambar 1. 3 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Kabupaten Sidoarjo Agustus 2018 – Agustus 2020

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2020

Dari data TPT di Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT naik 6,35 persen poin menjadi 10,97 persen pada Agustus 2020 dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 4,62 persen. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah

kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara pendidikan yang lain sebesar 14,9 persen. Dibandingkan Agustus 2019, terjadi kenaikan TPT di semua tingkat pendidikan. Kenaikan TPT tertinggi dalam setahun terakhir terjadi pada lulusan diploma sebesar 9,8 persen, lulusan SMA yaitu 7,9 persen poin, dan lulusan SMK naik sebesar 7,8 persen poin. TPT adalah parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Merujuk pada data di atas menyatakan bahwa semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan TPAK. Tetapi, di sisi lain lapangan pekerjaan yang belum mampu menampung penduduk usia kerja/angkatan kerja yang masih berstatus pengangguran. Pengangguran yang tinggi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan persoalan-persoalan sosial yang semakin meningkat. Menurut Nugroho (2013) variabel pengangguran menunjukkan adanya hubungan positif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya mengurangi kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin berkurangnya kemakmuran masyarakat akan karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu keadaan ekonomi yang mengalami penurunan diakibatkan oleh Covid-19. Menurut Syahriah (2020) Pandemi covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang tidak wajar pada kelompok tertentu, yang dapat memperburuk ketimpangan dan mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja. Pandemi

Covid-19 ini berdampak hampir pada semua aspek seperti pada aktivitas dari pada perekonomian penduduk yang meliputi aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Menurut BPS Kabupaten Sidoarjo, pada penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu: pengangguran karena Covid-19, bukan angkatan kerja karena Covid-19, sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan pengurangan jam kerja karena Covid-19. Untuk penjelasan detail terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen	Total
Pengangguran karena Covid-19 (ribu orang)	47,0
Bukan angkatan kerja karena Covid-19(ribu orang)	9,6
Sementara tidak bekerja karena Covid-19 (ribu orang)	12,9
Pengurangan jam kerja karena Covid-19(ribu orang)	288,2
Total (ribu orang)	357,7
Penduduk usia kerja/PUK (ribu orang)	1 783,7
Persentase terhadap PUK (persen)	20,06

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2020) dalam Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020

Pada tabel di atas dilihat bahwa dari 1,7 juta penduduk usia kerja di Sidoarjo, 357 ribu atau 20,06 persen diantaranya terdampak Covid-19. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Sidoarjo bahwa peningkatan angka pengangguran yang ada di Sidoarjo akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah daerah berupaya untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat.

Terobosan-terobosan strategis memang dirasa perlu untuk menekan angka tersebut. Apalagi seperti sekarang ini banyak pengangguran muncul akibat pandemi ini seperti kasus PHK yang semakin banyak. Pemerintah terus berupaya untuk membuka lowongan pekerjaan di berbagai sektor. Pemerataan kesempatan

kerja harus diupayakan, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor. Perlunya perluasan kesempatan kerja dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan dari pengangguran pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai program untuk penanggulangan angka pengangguran yaitu Program pelatihan melalui Badan Pelatihan Kerja (BLK), Program *Jobmatching*, Program *Job Fair*. Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Program yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat adalah Program *Job Fair*. Dibuktikan dengan jumlah peserta yang mengikuti program ini lebih dari seribu orang pertahunnya dengan berbagai macam bidang kerja. Sedangkan program lain seperti BLK jumlah peserta pertahunnya 416 orang dari 12 bidang kerja.

Di dalam program *Job Fair* tidak hanya beberapa bidang kerja saja seperti BLK namun, banyak kerjasama dari perusahaan dengan bidang kerja . sehingga memberikan peluang banyak bagi pencari yang akan mengikuti Program *Job Fair*. Program *Job Fair* yang diadakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo berhasil turunkan angka pengangguran melalui *Job Fair*. Hal ini dibuktikan dengan berita berikut:

“Tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo tidak menentu. Naik turun. Namun tahun 2018 ini mengalami penurunan. Kami yakin dengan kegiatan *Job Fair* bisa turut membantu para pencari kerja untuk mengisi lowongan,” katanya di sela pembukaan kegiatan *Job Market Fair* di lapangan tenis kompleks GOR Delta Sidoarjo, Selasa, (16/10).

(<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sidoarjo-berhasil-turunkan-angka-pengangguran-> diakses pada 13 Desember 2021)

Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran terbukti bahwa pada 2015, pengangguran di wilayahnya sebanyak 68.311 jiwa sedangkan data sementara tahun 2018 turun menjadi 53.473 jiwa (Sidoarjo Berhasil Turunkan Angka Pengangguran, 2018). Dalam pelaksanaan *Job Fair* ini tercatat sebanyak 2.500 orang telah mengambil formulir pendaftaran lowongan pekerjaan yang telah disediakan dan pihak yang berpartisipasi dalam *Job Fair* sebanyak 58 perusahaan. *Job Fair* diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada para pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja. Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran terbukti bahwa pada 2015, pengangguran di wilayahnya sebanyak 68.311 jiwa sedangkan data sementara tahun 2018 turun menjadi 53.473 jiwa.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tupoksi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Program Bursa Kerja (*Job Fair*) mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pasal 1 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo no 92 tahun 2019 ayat 18 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada bidang tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi memiliki fungsi yaitu salah satunya pelaksanaan pemberian rekomendasi swasta dalam penyelenggaraan bursa kerja (*Job Fair*).

Job Fair merupakan salah satu wadah atau tempat bertemunya pihak perusahaan dan pencari kerja secara langsung yang diadakan di salah satu tempat yang disediakan oleh pihak penyelenggara *Job Fair*, baik pihak Pemerintah maupun swasta. *Job Fair* merupakan media yang dapat menjembatani antara penyedia kerja (perusahaan) dengan pencari kerja dalam penyampaian informasi lapangan pekerjaan. Tujuan *Job Fair* tentu saja untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Pelaksanaan *Job Fair* ini tentu sangat memerlukan peran berbagai entitas atau aktor. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melibatkan para *stakeholders* dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat ini tak lain ialah agar kebutuhan masyarakat tentang informasi lowongan pekerjaan. Kerjasama ini yaitu kesepakatan antara dua pihak yang memungkinkan antar

kedua pihak tersebut melakukan kerjasama sehingga tercapainya tujuan yang sama, dan kerjasama ini masing-masing pihak berperan melakukan tugasnya sesuai tanggung jawab masing masing. Pelayanan publik sebagai salah satu bentuk barang publik (*public goods*) yang diberikan pemerintah sudah selayaknya diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada pemerintah.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Mashitho (2021), yang berjudul Implementasi Program *Jobfair* Sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Job Fair* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Dinas Tenaga Kerja belum optimal karena komunikasi Dinas Tenaga Kerja dengan pihak swasta tidak maksimal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian milik Darmawan, (2019), yang berjudul Implementasi Program *Job Fair* di Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program *job Fair* di Kota Tomohon masih belum maksimal karena dari tiga aktivitas utama yakni pengorganisasian diketahui bahwa keterlibatan dari struktur pelaksana baik dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon maupun dari pihak perusahaan dalam Program *Job Fair* sangat dibutuhkan, kemudian pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya sesuai dengan juklak dan juknis dan aplikasi diketahui untuk prosedur pelaksanaanya belum sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dari Dinas Tenaga Kerja ini menyebabkan proses sosialisasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya ada penelitian milik Syariyah et al, (2020), yang berjudul Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Tentang Bursa Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi disposisi dan struktur birokrasi. Namun dari sisi komunikasi dan sumber daya manusia sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Hal tersebut dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan bursa kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Dari kondisi ini menandakan bahwa implementasi dari program *Job fair* ini masih belum maksimal dan perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya program *Job fair*.

Program *Job Fair* ini sangat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan daya tampung tenaga kerja baru dalam pelaksanaan *Job Fair* di Kabupaten Sidoarjo semakin sedikit. hal ini dibuktikan dalam data berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Peserta Kegiatan Job Fair

Tahun Pelaksanaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Diterima
2018	85	2.218	986
2019	89	3.449	1.300
2020	41	1.330	352

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Data diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel di atas, fenomena yang terjadi saat ini yaitu bahwasanya lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum memadai, dikarenakan jumlah angkatan kerja terus meningkat melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Serta pada jumlah pencari kerja yang diterima tidak sebanding dengan

jumlah para pencari kerja. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga terjadinya kesenjangan antara kompetensi dari pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Seperti yang diberitakan berikut:

“Jumlah lowongan yang tersedia kali ini turun dibanding sebelumnya. Penurunan kebutuhan pekerja tersebut juga diikuti jumlah pelamar, meski demikian jumlah pelamar masih di atas ribuan. Bursa Kerja kali ini jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanyak tahun lalu, meski demikian Disnaker Sidoarjo berupaya menggandeng puluhan perusahaan untuk bergabung”.

(<https://surabaya.liputan6.com/read/4121162/sidoarjo-job-fair-buka-peluang-1222-pekerja-baru> diakses pada 13 Desember 2021)

Job Fair yang digelar pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelamar, antara perusahaan dan para pencari kerja saling membutuhkan dan dengan banyak pelamar yang diterima kerja, akan berdampak pada angka pengangguran yang turun. Oleh karena itu, mengingat pentingnya Program *Job Fair* dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini perlu mendapat perhatian.

Dari kondisi di atas memberikan gambaran bahwa implementasi dari program *Job Fair* belum terlaksana dengan maksimal. Dengan hal ini, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program *Job Fair*. Hal tersebut senada dengan Ralph Tyler dalam Arikunto (2013:3) evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. sebagian pendapat yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni Chronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto (2013:3). Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi

bukan sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Berkaitan dengan evaluasi, menurut Dunn (2013), gambaran utama evaluasi adalah evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki oleh metode analisis kebijakan lainnya yaitu, fokus nilai, interdependensi fakta nilai, dan orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas efektifitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Dari kriteria yang dijelaskan tersebut, maka penelitian ini menyangkut pada upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan jumlah pengangguran melalui program *Job Fair*, evaluasi dari program *Jobfair* dalam penanggulangan pengangguran dan kendala serta solusi program *Jobfair* dalam penanggulangan pengangguran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Program *Job Fair* yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan lokus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap Program *Job Fair* yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan judul “**Evaluasi Program Bursa Kerja (*Job Fair*) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program Bursa Kerja (*Job Fair*) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program bursa kerja (*Job Fair*) dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademisi terhadap permasalahan mengenai masalah pengangguran yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo yang sampai saat ini masih perlu adanya penelitian dan perumusan solusi atas masalah tersebut serta mengetahui evaluasi dari Program *Jobfair* dalam menanggulangi permasalahan pengangguran yang pada kesempatan ini telah dipaparkan hasil penelitian yang bisa menjadi bahan acuan, referensi dan sumber teori untuk pembelajaran di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sehingga bisa menambah pemahaman mengenai output yang dihasilkan oleh Program *Jobfair* sehingga masyarakat dapat mengatur strategi atau rancangan agar bisa mengatasi masalah sosial-ekonomi tersebut.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Menjadi bahan diskusi, referensi dan bisa dijadikan sebagai koreksi terhadap program-program yang dimiliki dan output yang dihasilkan serta Evaluasi Dalam Program *Jobfair* terhadap penanggulangan masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dapat digunakan untuk pertimbangan dalam merumuskan rancangan kebijakan di masa depan.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Publik.